

**KONTEKSTUALISASI ILMU AL- JARH WA AT-TA'DIL  
DALAM UPAYA MEMILIH WAKIL RAKYAT DAN KORELASINYA  
DENGAN TEORI KREDIBILITAS**

Muhammad Qomarullah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau Sumatra Selatan  
Email: ichalmarpolet@gmail.com

---

**Abstract:**

The election of representatives of the people as legislative candidates needs to use a method of criticism of the personality of leadership. In Islam this method is explicitly in the knowledge of hadith, namely the Jarah wa Ta'dil lesson, although this knowledge is only to criticize the credibility of the hadith narrators. But, to determine the personality of the people's representatives, true knowledge of rawi criticism can be used to elect leaders or representatives of the people. So, Credibility Theory as an addition is also very important to make the theory of meaning become meaningful to determine the prospective legislative candidates that will soon be implemented in Indonesia.

**Keywords:** Jarah wa Ta'dil lesson, legislative candidates, the credibility theory

**Abstrak:**

Pemilihan wakil rakyat sebagai calon legeslatif perlu kiranya menggunakan metode kritik terhadap keperibadian pemimpin. Dalam Islam metode tersebut secara eksplisit ada pada ilmu hadis, yaitu ilmu al-Jarah wa at-Ta'dil, walau ilmu ini hanya untuk mengkritisi kredibilitas periwayat hadis. Tapi, untuk menentukan keperibadian wakil rakyat, sejatinya ilmu kritik rawi dapat dipakai untuk memilih pemimpin ataupun wakil rakyat. Maka, Teori Kredibilitas sebagai pendukung juga sangat punya peranan penting untuk menjadikan teori al-Jarah wa at-Ta'dil menjadi bermakna untuk menentukan calon legeslatif yang sebentar lagi dilaksanakan di Indonesia.

**Keywords:** Ilmu Jarh wa Ta'dil, calon legeslatif, Teori Kredibilitas.

---

**A. PENDAHULUAN**

Setiap lima tahun sekali, masyarakat Indonesia selalu ikut serta dalam memilih pemimpin. Saat itu suhu politik terasa makin hangat. Partai-partai politik makin gencar untuk memperkenalkan diri dengan melalui berbagai cara. Serta para calon anggota legislatif (caleg) pun tak mau ketinggalan sibuk dengan persiapan kampanyenya untuk mengumbar janji janji demi mendapatkan dukungan dan simpati dari konstituennya. Ditambah lagi dengan pemilihan presiden Republik Indonesia ke delapan, menjadi semakin bergemuruh perpolitikan di Indonesia nantinya.

Sementara dari sisi kinerja DPR seolah berjalan di tempat. Gambaran ini sangat mudah dilihat dari begitu banyaknya berita tentang bagaimana para anggota DPR yang hanya bersemangat untuk melancong ke luar negeri dengan dalih studi banding

dibandingkan dengan kewajibannya menghadiri sidang-sidang rutin di DPR.

Kejadian yang tidak pernah diharapkan oleh rakyat bahwa orang yang mereka perjuangkan dan mereka pilih untuk duduk di kursi sebagai wakil mereka justru mengkhianati secara terang-terangan. Di saat harga kebutuhan melambung permasalahan bangsa yang semakin pelik.

Senyatanya, wakil rakyat adalah seseorang yang terpilih secara demokratis dalam sebuah pemilu. Wakil rakyat ini mengemban tugas yang sangat penting dan mulia yaitu menjadi penyalur dari aspirasi rakyat didalam ranah legislatif maupun eksekutif. Dengan posisi ini, sudah semestinya anggota dewan adalah delegasi-delegasi rakyat yang diwakilinya. Faktanya, kata wakil rakyat inilah yang sering menjadi mantra sakti. Ada keputusan: demi rakyat. Ada persoalan: kami kan wakil

rakyat. Dalam konteks mantra sakti itu, kita boleh bertanya rakyat yang mana?

Permasalahan tersebut tidak akan mungkin terjadi bila rakyat selektif dalam memilih wakilnya. Sejalan dengan hal itu, panitia penyeleksi juga punya andil besar dalam menentukan kredibilitas wakil rakyat, didukung oleh kebijakan partai yang bukan hanya memikirkan kepentingan kelompok dan individu saja. Sehingga dapat menjaring wakil rakyat yang kredibel dalam mengemban amanah rakyat tanpa mengorbankan kepentingan politik juga. Hadis Nabi saw, berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الرِّبَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ  
مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ  
بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrâhîm dari Muslim telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepadaku Warqâ dari Abû az-Zinad dari al-A’raj dari Abû Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda:”Seorang pemimpin itu ibarat perisai, seseorang berperang dibelakangnya dan berlindung dengannya. Jika seorang pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka ia akan mendapatkan pahala karenanya, jika dia memerintahkan selain itu, maka ia mendapatkan siksa.”

Tanggung jawab yang besar inilah, yang menjadi kata kunci untuk memilih wakil rakyat yang mengayomi rakyat dan mengemban amanah rakyat. Sehingga, kredibilitas wakil rakyat sangat dipertaruhkan untuk mensejahterakan rakyat. Maka, dalam point pemilihan wakil rakyat perlu kiranya menggunakan metode kritik terhadap keberibadian pemimpin yang harus dipilih yang dalam Islam ada al-Jarah wa Ta’dîl untuk menentukan keberibadian wakil rakyat. Sejatinya, ilmu kritik rawi

dapat dipakai untuk memilih pemimpin ataupun wakil rakyat.

Ilmu al-Jarah wa Ta’dîl sebagai warisan dari tradisi Islam yang berfungsi untuk mengkritisi kepribadian seseorang dalam periwayatan hadis, hanya semata-mata dipakai untuk mengkritisi periwayatan hadis dalam sebuah teks hadis, senyatanya dapat dipakai dalam konteks lain sebagai kontekstualisasi keilmuan Islam khususnya di Indonesia. Upaya kontekstualisasi ini diharapkan dapat rumusan yang kredibel tentang sosok pemimpin dan wakil rakyat akan datang di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>1</sup> Teori yaitu sesuatu yang menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi landasan teori dalam penelitian. Landasan teori adalah teori-teori relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sebagai jawaban sebentar terhadap rumusan masalah.<sup>2</sup>

Kerangka kerja teoritis merupakan dasar dari keseluruhan proyek penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan dan dielaborasi hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data awal, baik wawancara atau observasi, dan juga studi literatur dalam kajian pustaka. Menurut Uma Sekaran, yang dimaksud dengan “kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.”<sup>3</sup>

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2011), 79-80

<sup>2</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2009), 30.

<sup>3</sup> Uma Seakaran, *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*, Second Edition, (T.tp: tt, 1984), 11.

teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.<sup>4</sup>

Oleh karena itu penuli langsung menjelaskan kerangka teoritis dari variabel penelitian untuk meningkatkan pembahasan. Kerangka teoritis yang penulis paparkan adalah teori *al-Jarah wa Ta'dil* dan teori kredibilitas yang lebih relevan dalam membahas tentang judul yang akan penulis analisa.

## 2. Teori *Al-Jarah Wa At-Ta'dil*

Dalam menilai pribadi seseorang periwayat hadis tertentu, terkadang para kritikus sependapat dan adakalanya berbeda pendapat. Selain itu tak jarang seorang kritikus menilai seorang periwayat yang sama dengan dua kualitas yang berbeda. Dalam satu kesempatan tertentu, seorang kritikus menilai dengan *Laisa bihi ba's*, sedangkan pada kesempatan lain menilai periwayat tersebut dengan kata *da'if*.<sup>5</sup> Padahal kedua *lafaz* itu memiliki pengertian dan peringkat yang berbeda.<sup>6</sup>

Melihat betapa urgensinya ilmu ini para pakar *'Ulûm al-Hadîs* menyusun kaedah-kaedah *al-Jarah wa at-Ta'dil*. Dengan adanya kaedah ini diharapkan hasil penelitian terhadap riwayat hadis dapat lebih obyektif. Berikut ini adalah teori-teori yang telah dikemukakan oleh ulama ahli *al-Jarah wa at-Ta'dil* dan perlu dijadikan bahan oleh para peneliti hadis tatkala melakukan kegiatan penelitian, khususnya berkenaan dengan penelitian para periwayat hadis yaitu;

*Pertama, at-Ta'dil Muqaddam 'alâ Jarh* (*Ta'dil* didahulukan atas *Jarh*). Maksudnya bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah sifat baiknya. karena sifat dasar periwayat hadis adalah

terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian maka sifat dominan adalah sifat terpuji. Pada umumnya ulama hadis menolak kaedah tersebut dengan alasan bahwa kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat yang tercela yang dimiliki oleh periwayat yang dinilainya. Sementara kritikus yang mengemukakan celaan adalah kritikus yang mengetahui ketercelaan periwayat yang dinilainya. meskipun demikian kaedah ini sepenuhnya didukung oleh Imâm an-Nasâi.<sup>7</sup>

*Kedua, al-Jarh Muqaddam 'alâ at-Ta'dil* (*al-Jarh* didahulukan atas *at-Ta'dil*). Maksudnya bila seseorang dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah sifat yang dinilai celaan. Alasannya karena kritikus yang menyatakan celaan lebih paham pribadi periwayat yang dicelanya. Kemudian yang menjadi dasar untuk memuji seorang periwayat adalah persangkaan yang baik dari seorang kritikus hadis dan persangkaan baik itu harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat bersangkutan. Kalangan ulama hadis, ulama fiqhi, dan ulama ushul fiqhi banyak menganut teori tersebut. Dalam pada itu, banyak juga ulama kritikus hadis yang menuntut pembuktian atau penjelasan yang menjadi latar belakang atas ketercelaan yang dikemukakan terhadap periwayat tersebut.<sup>8</sup>

*Ketiga, Lâ Ta'ârada al-Jarh wa al-Mu'addil fâ al-Hukm li al-Mu'addil illâ izâ subita al-Jarh al-Mufassar*. Maksudnya apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya. Apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kriikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Hadari Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 39-40

<sup>5</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kasahihan Sanad Hadis Nabi* (Jakarta; Bulan Bintang, 1988 M), 181.

<sup>6</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta; Bulan Bintang 1992 M), 77.

<sup>7</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi*, 79.

<sup>8</sup> Fâruh Hammadah, *al-Manhaj al-Isma'îl fî al-Jarh wa at-Ta'dil* (Ribat: Dâr an-Nasyr al-Ma'rîfât, 1989 M), 360.

<sup>9</sup> Fâruh Hammadah, *al-Manhaj al-Isma'îl fî al-Jarh wa at-Ta'dil* (Ribat: Dâr an-Nasyr al-Ma'rîfât, 1989 M), 360.

*Kecempat, Iẓâ Kâna al-Jarĥ dâ`ifan falâ yuqbal jarĥuhu li aṣ-Ṣiqah.* Maksudnya apabila kritikus yang mengungkapkan ketercelaan adalah orang-orang yang tergolong *da`if* maka kritiknya terhadap orang yang *Ṣiqah* tidak diterima. Alasannya orang yang bersifat *Ṣiqah* dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak *Ṣiqah*.

*Kelima, Lâ yuqbal al-Jarĥ illâ Ba`da at-Taṣābbut Khasyah al-Asybah fi al-Majrūhin.* *Al-Jarĥ* tidak diterima kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. Maksudnya apabila nama periwayat mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah satu periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat dari kesamaan atau kemiripan dari nama tersebut. Suatu kritikan harus jelas sarannya dalam mengkritik pribadi seseorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-keraguan atau kekacauan.<sup>10</sup>

*Kecenam, al-Jarĥ an-Nasyi' `an `adâwah duniyawayyah lâ yu`add bih (al-Jarĥ yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniaan tidak perlu diperhatikan).* Maksudnya apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki yang permusuhan dalam masalah keduniaan dengan pribadi periwayat yang dikritik dengan kecelaan itu, maka kritikan itu harus ditolak. Alasannya adalah pertentangan masalah pribadi tentang urusan dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif. Kritikus yang bermusuhan dalam urusan dunia dengan periwayat yang dikritik dengan celaan dapat berlaku subyektif karena didorong oleh rasa kebencian.<sup>11</sup>

Dari sejumlah teori yang disertai dengan alasannya masing-masing itu, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih obyektif terhadap periwayat hadis yang dinilai keadaan pribadinya. dinyatakan demikian karena tujuan

penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti teori tertentu, melainkan bahwa penggunaan teori-teori itu dalam upaya memperoleh hasil yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sulit dihasilkan.<sup>12</sup>

Adapun kaidah *al-Jarĥ wa at-Ta`dîl* ada beberapa bagian; *Pertama*, Keadilan seorang rawi dapat dilihat dari keislamannya, balig, berakal, terhindar dari sebab kefasikan, dan menjaga *murû`ah* (kepribadian/kewibawaan) berdasarkan kesaksian dari ulama.<sup>13</sup> *Kedua*, Kedhabitan seorang *râwî* dapat dilihat dari pemahaman, hafalan, dan kemampuan menyampaikan hadis yang diriwayatkannya itu kepada orang lain. *Ketiga*, Keadilah sahabat telah disepakati oleh para ulama.<sup>14</sup> *Kecempat*, *Râwî yang Majhûl* (tidak diketahui identitasnya) tidak jelas hukumnya, dan ulama menyarankan untuk mendingkan hadis yang diriwayatkannya.<sup>15</sup> *Kelima*, Seorang *râwî* yang melakukan perbuatan *bid`ah* riwayatnya dapat diterima apabila perbuatannya tidak sampai membuatnya menjadi kafir, tidak ada celaan selain *bid`ah* pada dirinya, bukan orang yang durhaka kepada Allah, atau mengemukakan hadis untuk membenarkan perbuatannya yang dianggap *bid`ah*.<sup>16</sup> *Kecenam*, Penilaian *râwî* yang semasa tidak diterima apabila yang menilainya hanya temannya sendiri tanpa adanya pendapat ulama lain. Juga, tidak dapat diterima apabila seorang

<sup>12</sup> Lihat Jalâl ad-Dîn `Abd ar-Rahmân ibn Abî Bakar as-Suyûṭî, *Tadrîb ar-Râwî fi Syarĥ Taqrîb an-Nawawî*, (Beirut; Dâr Iḥyâ' as-Sunnah an-Nabawiyyah, 1997 M) Juz. I., 305-314. Lihat juga. Abû Lubâbah Husain, *al-Jarĥ wa at-Ta`dîl*, (Riyad: Dâr al-Liwâ', 1399 H/1979 M), 136-142.

<sup>13</sup> Lihat al-Qasimî, *al-Jarĥ wa at-Ta`dîl*, (Beirut: Muassah ar-Risâlah, 1399 H/ 1979 M), 6-9. Lihat. Syams ad-Dîn Muḥammad ibn `Abd ar-Rahmân asy-Syukawî, *al-Mutakallim fi ar-Rijâl*, (Kairo: Maktabat al-Maṭbû`ât al-Islâmiyyah, 1400 H/1980 M), 86. Lihat juga Abû al-`Abbâs Syihâb ad-Dîn Aḥmad ibn Muḥammad al-Qastalânî, *Irsyâd as-Sârî li Syarĥ Saḥîĥ al-Bukhârî*, (Beirut; Dâr al-Fikr, t.th), 16.

<sup>14</sup> Lihat A.Syahrani, *Kritik Sanad Dalam Perspektif Sejarah*, (Makassar; Alauddin Press, 2011 M), 130-131. Lihat pula *Ensiklopedia Islam*, Vol. 2 (Jakarta Ikhtiar Baru Van Houve, 1998 M), 198

<sup>15</sup> Ḥâtim ibn `Ârif ibn Nâsir asy-Syarîf al-`Aunî, *At-Takhrîj wa ad-Dirâsah al-Asânîd* (t.tp: t.t, t.th), 101.

<sup>16</sup> Ḥâtim ibn `Ârif ibn Nâsir asy-Syarîf al-`Aunî, *At-Takhrîj wa ad-Dirâsah al-Asânîd* (t.tp: t.t, t.th), 101.

<sup>10</sup> Fâruh Hammadah, *al-Manhaj al-Isma`îl fi al-Jarĥ wa at-Ta`dîl (Ribat: Dâr an-Nasyr al-Ma`rifât, 1989 M), 360.*

<sup>11</sup> Fâruh Hammadah, *al-Manhaj al-Isma`îl fi al-Jarĥ wa at-Ta`dîl (Ribat: Dâr an-Nasyr al-Ma`rifât, 1989 M), 360.*

*râwî* di-*jarh* disebabkan karena berbeda mazhab.<sup>17</sup>

### 3. Teori Kredibilitas

Konsep kredibilitas menurut Kiousis,<sup>18</sup> secara umum terbagi dua, yaitu; kredibilitas sumber dan kredibilitas media. Kredibilitas sumber (*source credibility*) meliputi konteks-konteks antarpribadi, organisasi, dan media massa, telah terlibat dalam pengkajian mengenai bagaimana ciri-ciri komunikator yang berbeda-beda dapat mempengaruhi pemrosesan pesan.<sup>19</sup> Kredibilitas dalam ilmu komunikasi bukanlah ilmu baru, Aristoteles menggunakan istilah “*ethos*” menyebut sifat-sifat pribadi seorang komunikator yang mempengaruhi halayak. Aristoteles mengatakan bahwa :

*“Persuasi tercapai karena karakteristik personal pembicara, yang ketika ia menyampaikan pembicaraannya kita menganggapnya dapat dipercaya. Kita lebih cepat percaya pada orang-orang baik daripada orang lain. Ini berlaku umumnya pada masalah apa saja dan secara mutlak berlaku ketika tidak mungkin ada kepastian dan pendapat terbagi. Tidak benar, anggapan sementara penulis retorika bahwa kebaikan personal yang diungkapkan pembicara tidak terpengaruh apa-apa pada kekuatan persuasinya, sebaliknya, karakternya hampir bisa disebut sebagai alat persuasi yang paling efektif yang dimilikinya.”*<sup>20</sup>

Adapun kredibilitas terbagi menjadi; *Pertama*, Kredibilitas Sumber yaitu mencari tahu bagaimana modifikasi pada karakteristik-karakteristik sumber mempengaruhi keinginan orang mengubah sikapnya terhadap isu-isu tertentu. Hovland dkk menemukan bahwa keahlian dan kredibilitas sumber dianggap

sebagai dua atribut penting dari kredibilitas sumber. Meskipun demikian mereka juga mengakui bahwa dampak pesan dapat juga tergantung publikasi atau saluran tertentu.<sup>21</sup>

Onong Uchjana Effendy menyebutkan bahwa faktor penting pada komunikator pada saat melakukan kegiatan komunikasi adalah sumber daya tarik (*source attractiveness*) dan sumber kepercayaan (*source credibility*), yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup> Sumber daya tarik Seorang komunikator akan berhasil dalam berkomunikasi, akan mampu mengubah sikap, opini dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika komunikan bersedia taat pada isi pesan yang dilancarkan komunikator. Kemudian Sumber kepercayaan Faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil adalah kepercayaan komunikan pada komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator.

Berlo dkk, setelah melakukan serangkaian analisis faktor terhadap *differential scales*, menyimpulkan bahwa kredibilitas sumber memiliki tiga dimensi; keselamatan, kualifikasi dan kedinamisan. Sementara itu, Whitehead (1968) menambahkan faktor kompetensi dan obyektivitas sebagai komponen penting kredibilitas. Melihat kenyataan ini dapat dikatakan bahwa para ilmuwan belum memiliki kata sepakat mengenai kredibilitas sumber.<sup>23</sup>

Dari semua ide dari para ilmuwan tersebut maka akan kita dapatkan bahwa kredibilitas sumber berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu: 1) keahlian dan kredibilitas, 2) keselamatan, kualifikasi dan kedinamisan, dan 3) kompetensi dan obyektivitas.

*Kedua*, Kredibilitas Media adalah orang pertama yang melakukan analisis menyeluruh terhadap kredibilitas saluran dari berbagai ragam media. Hasil temuannya, para ilmuwan mencatat bahwa variabel demografis tertentu (seperti; usia, pendidikan dan jenis kelamin) memiliki pengaruh terhadap persepsi orang mengenai kredibilitas saluran. Selain faktor

<sup>17</sup> Hâtim ibn ‘Ârif ibn Nâsir asy-Syarîf al-‘Aunî, *At-Takhrîj wa ad-Dirâsah al-Asânîd* (t.tp: t.t, t.th), 87.

<sup>18</sup> Kiousis, S. “Public Trust or Mistrust Perception of Media Credibility in the Information Age,” *Mass Communication and Society*, (November 04, 2001), 381-403

<sup>19</sup> Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1984), , 43.

<sup>20</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 255.

<sup>21</sup> Hovland, C. I., Janis, I. K. & Kelley, , H, *Communication and Persuasion*, (New Haven, CT: Yale University, 1953), dikutip Yunus Winoto dalam “Penerapan Teori Kredibilitas Sumber (*Source of Credibility*) dalam Penelitian-Penelitian Layanan Perpustakaan,” *EduLib*, Tahun 5 Vol. 5, No.2 (November 2015), 2-4.

<sup>22</sup> Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi*, 43

<sup>23</sup> Kiousis, S. “Public Trust, 383

demografis, perbedaan antara kredibilitas media dan preferensi terhadap media. Dengan kata lain, orang tidak selalu merasa media yang mereka sukai sebagai yang paling kredibel. Kredibilitas media dapat diukur dengan berbagai cara tergantung pada kombinasi pertanyaan yang digunakan.<sup>24</sup>

Peningkatan penggunaan media biasanya diimbangi oleh meningkatnya rating kredibilitas untuk saluran apapun yang diamati. Sebaliknya pola penggunaan media tidak berkorelasi dengan kredibilitas media, dan mereka menambahkan bahwa jenis pertanyaan untuk mengukur penggunaan media mungkin mendostorsi temuan. Selanjutnya, hubungan yang signifikan antara frekuensi penggunaan media dan kredibilitas media. Tetapi mereka menemukan hubungan antara ketergantungan responden pada media tertentu untuk mendapatkan informasi dengan kredibilitas media.<sup>25</sup>

Sebagian penelitian telah menunjukkan bahwa pola komunikasi antar pribadi relevan dengan perbedaan persepsi mengenai kredibilitas saluran. Pinkleton (1999), menyatakan bahwa diskusi tatap muka dengan teman, tetangga, dan anggota keluarga merupakan sumber utama informasi politik. Perbincangan politik diprediksikan berkaitan dengan tingkat minat dalam politik, dan pada gilirannya memprediksikan partisipasi politik. Bahkan akhir-akhir ini, komunikasi antarpribadi telah diistilahkan sebagai “jantungnya demokrasi.”<sup>26</sup>

Kredibilitas juga masih mempunyai empat komponen lagi, yaitu: (1) dinamisme; (2) sosiabilitas; (3) koorientasi; (4) kharisma. Komunikator memiliki dinamisme, bila ia dipandang sebagai bergairah, bersemangat, aktif, tegas dan berani. Sosiabilitas adalah kesan komunikator sebagai orang yang riang dan suka bergaul. Koorientasi merupakan kesan komunikator sebagai orang yang mewakili kelompok yang disenangi, yang mewakili nilai-nilai kita. Kharisma digunakan untuk menunjukkan suatu sikap luar biasa yang dimiliki komunikator yang menarik dan

mengendalikan komunikasi, pesona yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.<sup>27</sup>

Dari kedua teori kredibilitas, maka teori kredibilitas sumber yang paling besar peranannya serta lebih berperan penting sebagai bentuk keperibadian, seperti: Kejujuran pada skala benar salah, jujur dan tidak jujur, bisa dipercaya atau tidak, serta adil dan tidak adil. Faktor profesionalisme, berdasarkan skala berpengalaman dan tidak, bergaya profesional dan tidak.<sup>28</sup>

#### 4. Wakil Rakyat Dan Aspirasi Rakyat Sebuah Paradok

Warga Negara yang berniat maju dan bertarung sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang akan datang. Mereka akan memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah. Tentu saja keinginan besar warga Negara tersebut perlu mendapat apresiasi yang positif, karena sikap tersebut mencerminkan keinginan dan niat baik mereka berpartisipasi dalam membangun dan mengisi kemerdekaan Negara kita tercinta ini.

Persyaratan yang tidak sulit, membuat keinginan mereka menjadi calon anggota legislative semakin berambisi untuk menang dalam pemilihan umum nanti. Demikian pula halnya dengan sistem penentuan pemenang yang terjadi saat ini. Meskipun dalam UU Pemilu masih menggunakan nomor urut dalam menentukan siapa yang akan menang, namun sudah banyak partai politik yang menggunakan jumlah suara terbanyak yang berhak menduduki kursi anggota Dewan.<sup>29</sup> Dengan penggunaan suara terbanyak ini, maka setiap calon akan

<sup>27</sup> Siagian, Haidir Fitra, “Hubungan Antara Kredibilitas Komunikasi dengan Sikap Politik”, Makalah, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2007), 23.

<sup>28</sup> Lihat A.A. Said Gatara dan Mo, Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), , 157-158. Lihat juga. Haidir Fitra Siagian, “Pengaruh Kredibilitas Komunikator Politik untuk Mendapatkan Dukungan khalayak dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No.2 (Desember 2012), 283-284.

<sup>29</sup> Ada 20 partai politik yang masuk peserta Pemilu termasuk 4 partai Lokal Aceh, partai PKPI termasuk dalam peserta Pemilu dalam putusan KPU di masa akhir penetapan Partai peserta Pemilu. Lihat <https://news.detik.com/berita/3969293/dapat-nomor-urut-20-pkpi-resmi-jadi-peserta-pemilu-2019>. (Diakses Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 13.11 WIB)

<sup>24</sup> Kiosis, S. “Public Trust, 384-385

<sup>25</sup> Kiosis, S. “Public Trust, 384-385.

<sup>26</sup> Kiosis, S. “Public Trust, 385.

berusaha merebut suara sebanyak-banyaknya, tanpa memandang apa nama partai politiknya. Akan halnya kepada rakyat yang akan memilih, dia bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Sistem suara terbanyak ini pun akan mengurangi peran partai politik, yang justru diserahkan kepada masing-masing calon dari partai tersebut.<sup>30</sup>

Syarat utama seorang calon anggota legislatif – selanjutnya disebut sebagai komunikator politik, dalam proses penggalangan dukungan pemilih adalah memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan kredibilitas yang tinggi, komunikator politik Dapat menyampaikan pesan yang efektif kepada *audiens*. Dimana efektifitas pesan yang disampaikan ini akan dapat memberikan citra positif di mata *audiens*, yang pada gilirannya para *audiens* akan terpengaruh dengan pesan yang disampaikan tersebut.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah), Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, Menetapkan UU bersama dengan Presiden, Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.<sup>31</sup>

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden), Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, Memberikan persetujuan terhadap

pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.<sup>32</sup>

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).<sup>33</sup>

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain: Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain, Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden, Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.<sup>34</sup>

Persoalan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaruh kredibilitas komunikator politik dalam rangka mendapatkan dukungan dari khalayak dalam rangka memenangkan pemilihan umum nanti. Ditinjau dari perspektif komunikasi politik, kredibilitas komunikator memiliki tingkat *signifikansi* yang sangat tinggi untuk mendapatkan simpati publik. Komunikator politik harus dapat mengemas pesan yang efektif dan mendesain sebuah pesan sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku seperti yang diinginkan komunikator. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan

<sup>30</sup> Penggunaan sistem suara terbanyak ini memiliki kekurangan. Antara lain adalah adanya kemungkinan peran partai politik tidak menentukan lagi. Sifat individual calon menjadi raja karena mereka akan berusaha memenangkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan teman-temannya sesama calon dari partai yang sama. Lihat Haidir Fitra Siagian, "Pengaruh, , 284

<sup>31</sup> Lihat <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>. (Diakses: Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 13.37 WIB)

<sup>32</sup> <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>. (Diakses: Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 13.37 WIB)

<sup>33</sup> <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>. (Diakses: Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 13.37 WIB)

<sup>34</sup> <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>. (Diakses: Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 13.37 WIB)

komunikator politik pada saat melakukan proses komunikasi politik dengan audiensnya adalah pada saat dimana audiens bersedia memberikan suaranya dalam pemilihan umum.<sup>35</sup>

### 5. Aplikasi Kontekstualisasi Ilmu *Al-Jarh Wa At-Ta'dil* Dalam Menentukan Wakil Rakyat Dan Korelasinya Dengan Teori Kredibilitas

Adapun aplikasi teori *al-jarh wa at-ta'dil* dalam memilih wakil rakyat terletak pada syarat menjadi wakil rakyat, disini melihat dari sifat seorang calon tersebut, dengan kata lain apakah banyak yang menganggap buruk atau banyak yang menganggap baik, disertai alasan yang diberikan oleh pengkritik atau yang menganggap baik. Peran penting ilmu *al-jarh wa at-ta'dil* untuk mengakomodir kepentingan rakyat sehingga calon yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR merupakan calon yang memang tepat dalam membawa atau mengemban amanah rakyat.

Kemudian keterangan pengkritik terhadap calon juga harus jelas, karena bila banyak yang mengkritisi tentang calon tersebut, maka partai pengusung maupun KPU dapat mencoret peserta tersebut karena akan berakibat fatal, sebab dimungkinkan calon tersebut tidak amanah. Tetapi, bila yang mengkritisi terhadap calon adalah musuh politiknya atau orang yang beseberangan dengan pemikiran politiknya maka pendapat tersebut tidak dapat dipakai, karena ada sentimen politis yang dibawa oleh pengkritisi. Di sinilah nilai obyektifitas dari panitia penyeleksi bakal calon menjadi modal awal dalam memilih wakil rakyat.

Syarat-syarat wakil rakyat menurut ilmu *al-jarh wa at-ta'dil* sebagai berikut; *Pertama*, Keadilan seorang calon bila sosok tersebut beragama Islam, baligh, berakal, dan tidak fasik, serta menjaga kewibawaan atau marwahnya; *Kedua*, memiliki kecerdasan intelektual yang mumpuni; *Ketiga*, dapat menjadi bakal calon kalau semua rakyat mendukung disertai keputusan Partai dan KPU karena kebaikannya; *Kempat*, tidak memasukkan orang yang tidak amanah dengan kata lain pernah terlibat kasus yang menjaturnya dalam masalah hukum; *Kelima*, bila calon hanya berbuat kesalahan yang tidak

fatal, maka tetap diloloskan dari pencalonan; *keenam*, calon tetap dapat diusung bila ada kritik dari lawan politik atau musuh politiknya.<sup>36</sup>

Sedangkan korelasi terhadap teori Kredibilitas dalam memilih wakil rakyat adalah bagaimana seorang calon dapat menimbulkan sumber daya tarik dan sumber kepercayaan sesuai dengan kemampuan komunikator, bilamana ia memiliki sifat keadilan dan kedabitan dalam ilmu *al-jarh wa at-ta'dil*, maka otomatis dua hal tersebut dapat berjalan dengan seimbang sesuai dengan teori kredibilitas.<sup>37</sup> Faktor yang berpengaruh dalam teori kredibilitas yaitu faktor kejujuran, kepercayaan, kebenaran, dan keadilan. Kemudian faktor profesionalisme atau kompetensi dengan pengalaman yang ada, serta faktor dinamisme dengan pergerakan dari seorang calon itu untuk bergerak aktif. Terakhir adalah faktor objektivitas terhadap pandangan dan pemikiran seorang calon dalam menyikapi permasalahan yang ada.<sup>38</sup>

Dari kedua teori tersebut terdapat korelasi yang jelas mengenai bagaimana memilih wakil rakyat, sehingga akan tercipta pemimpin pemimpin yang mengemban amanah serta akan menjadi barometer kemajuan umat yang ada di Indonesia. Bilamana Partai politik serta KPU menerapkan teori tersebut, maka mereka menjadi fasilitator bagi kebangkitan Islam sebagai rahmat sekalian alam, serta mengimplementasikan Indonesia sebagaimana Kota Madinah pada kepemimpinan Nabi Muhammad dan Para *Khulafā' ar-Râsyidîn*.

### C. PENUTUP

Ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dil* seolah menjadi sebuah ilmu yang usang, yang hanya digunakan untuk mengkritik riwayat hadis. Ilmu ini juga dianggap hanya sebuah tehnik untuk mengkritisi seorang periwayat hadis saja. Padahal, kajian teks hadis dapat terjaga keotentitasannya dan orisinalitasnya menggunakan ilmu *al-jarh wa at-ta'dil*. Sehingga, kemurnian hadis dalam sebuah tatanan hukum Islam dapat terjaga.

Bilamana teori tersebut diangkat dalam rumusan memilih wakil rakyat akan menjadi

<sup>36</sup> Lihat A.Syahrani, *Kritik Sanad*, 161.

<sup>37</sup> Lihat juga. Haidir Fitra Siagian, "Pengaruh Kredibilitas Komunikator,, 285

<sup>38</sup> Haidir Fitra Siagian, "Pengaruh Kredibilitas Komunikator, 288

<sup>35</sup> Lihat Haidir Fitra Siagian, "Pengaruh Kredibilitas Komunikator, 284-285.

lebih menarik lagi, karena ilmu *al-jarh wa at-ta'dil* sebenarnya dapat dikontekstualisasikan dalam memilih wakil rakyat serta pemimpin di Indonesia. Ilmu tersebut menjadi lebih menarik bila dikorelasikan dengan teori kredibilitas agar menjadi lebih fleksibel dalam merealisasikan aturan main dalam kanca perpolitikan di Indonesia. Dengan menggabungkan dua teori tersebut, akan terpilih wakil rakyat yang kredibel, dan dapat memajukan Indonesia.

Diharapkan, pemikiran ini menjadi langkah awal sebuah penelitian sebagai wacana untuk menghidupkan kembali ilmu yang dianggap usang yang hanya digunakan sebagai ilmu kritik teks. Padahal, *al-jarh wa at-ta'dil* masih tetap relevan, serta dapat dikontekstualisasikan dalam pemilihan wakil rakyat dan pemilihan pemimpin di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasîmî, *al-Jarh wa at-Ta'dil*, Beirut; Muassat al-Risâlah, 1399 H/ 1979 M.
- Al-Qastâlânî, Abû al-Abbâs Syihâb ad-Dîn Ahmad ibn Muḥammad, *Irsyâd as-Sâri li Syarh Sahîh al-Bukhârî*, Beirut; Dâr al-Fikr, t.th.
- As-Suyûtî, Jalâl ad-Dîn `Abd ar-Raḥmân ibn Abî Bakar, *Tadrîb ar-Râwî fi Syarh Taqrîb an-Nawawî*, Beirut; Dâr Ihyâ' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1997 M.
- Asy-Syarîf al-`Aunî, Hâtîm ibn `Arîf ibn Nâsir. *at-Takhrîj wa ad-Dirâsah al-Asânîd*, t.tp: t.t, t.th.
- Asy-Syukawî, Syams ad-Dîn Muḥammad ibn `Abd ar-Raḥmân, *al-Mutakallim fi ar-Rijâl*, Kairo: Maktabat al-Maṭbû'ât al-Islâmiyyah, 1400 H/1980 M.
- C. I., Hovland, Janis, I. K. & Kelley, H. H, *Communication and Persuasion*, New Haven, CT: Yale University, 1953
- Effendi, Onong Uchaja, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1984.
- Felix Tendeken, "Herson Mayulu: Wakil rakyat tidak peduli, inilah cermin mereka hanya hobi jalan-jalan", *Tribun Bolel*.  
<http://manado.tribunnews.com/2018/02/19/herson-mayulu-wakil-rakyat-tidak-peduli-inilah-cermin-mereka-hanya-hobi-jalan-jalan?page=all>.
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007.
- Hammadah, Fâruh. *al-Manhaj al-Ismâ'îl fi al-Jarh wa at-Ta'dil*, Ribât: Dâr an-Nasyr al-Ma`rifât, 1989 M.  
<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.  
<https://news.detik.com/berita/3969293/dapat-nomor-urut-20-pkpi-resmi-jadi-peserta-pemilu-2019>.
- Husain, Abû Lubâbah. *al-Jarh wa at-Ta'dil*, Riyad; Dâr al-Liwâ', 1399 H/1979 M.
- Ismail, Muhammad Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta; Bulan Bintang 1992.
- \_\_\_\_\_. *Kacdah Kasahihan Sanad Hadis Nabi*, Jakarta; Bulan Bintang, 1988.
- Kiosis, S. "Public Trust or Mistrust Perception of Media Credibility in the Information Age," *Mass Communication and Society*, November 04, 2001.
- Muslim, Ibn Hajjâj al-Qusyairî an-Nîsabûrî, *Sahîh Muslim*, t.tp: Dâr al-Kutub al-`Arabiyyah, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Rakhmat, Jalaluddin *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ryana Aryadita Umasugi, "Pendaftaran Caleg Dibuka Serentak, Ini Tahapan-tahapannya", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/04/16232181/pendaftaran-caleg-dibuka-serentak-ini-tahapan-tahapannya>.
- Seakaran, Uma. *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*, Second Edition, t.tp: t.t, 1984.
- Siagian, Haidir Fitra. "Hubungan Antara Kredibilitas Komunikasi dengan Sikap Politik", *Makalah*. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2007.
- Siagian, Haidir Fitra. "Pengaruh Kredibilitas Komunikator Politik untuk Mendapatkan Dukungan khalayak

- dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No.2 Desember 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Syahrani, A. *Kritik Sanad Dalam Perspektif Sejarah*, Makassar; Alauddin Press, 2011 M.
- TIM Penyusun, *Ensiklopedia Islam*, Vol. 2 Jakarta Ikhtiar Baru Van Houve, 1998.
- Winoto, Yunus dalam “Penerapan Teori Kredibilitas Sumber (*Source of Credibility*) dalam Penelitian-Penelitian Layanan Perpustakaan,” *EduLib*, Tahun 5 Vol. 5, No.2 November 2015.
- Yswitopr “DPR: Wakil Rakyat Politis” *Opini*. Thursday, Oktober 02, 2014 10:58 WIB  
<http://www.umm.ac.id/en/opini/dpr-wakil-rakyat-politis.html>.